

## **BAB II**

### **TAHAP-TAHAP AWAL EKONOMI-POLITIK PEMBANGUNAN KOREA SELATAN**

Korea Selatan kini dikenal akan keberhasilannya dalam sektor industri, baik dalam hal teknologi, otomotif, dll. Akan tetapi hal tersebut tidak diraih dengan instan. Kemajuan perindustrian di Korea Selatan tidak lepas dari seorang tokoh modernisasi yaitu Park Chung Hee. Saat pertama kali Park Chung Hee menjabat, kondisi Korea Selatan masih sangat jauh dari sebuah keberhasilan. Berbagai konflik hingga permasalahan pemerintahan pun terjadi sehingga menyebabkan penghambatan bagi kemajuan negara.

Banyak faktor yang mempengaruhi dinamika perekonomian di Korea Selatan. Salah satu faktor tersebut ialah negara tetangga yang menjadi negara penjajah Korea Selatan, yaitu Jepang. Selain Jepang, ada beberapa negara yang juga berusaha untuk menginvasi semenanjung Korea sebelum abad ke-20 seperti Cina dan Rusia. Walaupun pada akhirnya dipatahkan oleh militer Korea (Ayu 2011).

## 1. Masa Kependudukan Jepang di Korea

Jepang pernah mengokupasi Korea dimulai pada tahun 1910-1945, setelah kemudian Korea Selatan mendapatkan kemerdekaannya. Hal ini membawa pengaruh yaitu sempat munculnya rasa ketidakpercayaan antara rakyat Korea dan Jepang. Selain itu adanya isu sensitif yang muncul antar kedua negara (Yayusman 2011). Peninggalan Jepang juga merupakan salah satu pengaruh bagi perekonomian Korea Selatan. Karena pada akhir penjajahan Jepang, Korea Selatan mulai melakukan industrialisasi. Hal tersebut juga kental hubungannya dengan proses industrialisasi di Jepang. Oleh karenanya, industri di Korea Selatan pada saat itu masih dikuasai oleh Jepang.

*“Ekonomi Korea cuma sekedar bagian dari kegiatan ekonomi Jepang, yang berbeda hanya letak geografis nya saja” – George Mc Cuno*

Hal ini mempengaruhi pengembangan model mandiri oleh masyarakat Korea Selatan itu sendiri. Karena Jepang cukup berhati-hati dalam mencegah tumbuhnya modal pribumi Korea Selatan (A. Budiman 1991). Dan dengan dilatarbelakangi oleh kematian Ratu Myoengsong pada tahun 1895, Jepang memaksa Korea untuk menandatangani perjanjian *Eulsa* pada tahun 1905. Perjanjian *Eulsa* itu sendiri berisikan perjanjian dimana Korea sebagai protektorat Jepang atau memiliki arti yang sama dengan Korea resmi menjadi negara boneka atau negara jajahan Jepang pada tahun 1910. Hal tersebut membawa dampak tersendiri bagi Korea yaitu perekonomian, pemerintahan, pertahanan, dan tatanan kehidupan rakyat Korea hancur karena eksploitasi total oleh pihak Jepang terhadap Korea (Ayu 2011). Dalam kurun waktu 35 tahun, akhirnya masa

penjajahan Jepang terhadap Korea pun berakhir. Dapat dikatakan bahwa menjelang Korea bebas dari penjajahan, struktur masyarakat Korea adalah sebagai berikut:

1. Orang-orang Jepang menguasai negara dan juga kehidupan ekonomi. Negara membuat aturan-aturan yang menguntungkan bagi pengusaha-pengusaha Jepang. Karena itu tanah-tanah subur serta industri-industri besar dimiliki oleh mereka.
2. Kelompok elit Korea terdiri dari tuan tanah, pedagang dari industriawan-industriawan kecil. Meskipun kecil, burjuasi Korea di bidang perdagangan dan industri berhasil tumbuh juga.
3. Mayoritas rakyat Korea adalah para petani di desa dan buruh di kota. (A. Budiman 1991)

Akan tetapi dengan segala kenangan buruk rakyat Korea Selatan terhadap negara penjajahnya, Korea Selatan juga diuntungkan dengan adanya peninggalan-peninggalan oleh Jepang. Karena sedikit banyak, Jepang telah mengenalkan industri bagi rakyat Korea. Dan walau dengan adanya faktor historis yang kurang mengenakkan dan adanya isu-isu sensitif, hal tersebut tidak menghalangi kedua negara untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang lebih baik lagi (Yayusman 2011). Hubungan kedua negara menjadi lebih hangat saat masa pemerintahan Park Chung Hee berlangsung di Korea Selatan.

Pada awal kemerdekaan, perekonomian negara ginseng ini sangat terpuruk. Hal tersebut disebabkan tidak lain adalah karena tidak adanya sistem

dan struktur sendiri. Walaupun pada masa kependudukan Jepang, perkembangan perekonomian Korea sudah beralih dari agraris menjadi industri berat yang cukup maju. Akan tetapi, perkembangan pada bidang industri ini faktanya tidak membawa dampak yang lebih baik terhadap kesejahteraan masyarakat Korea pada saat itu. Tentu saja karena adanya kepentingan Jepang terhadap industri nya di Korea. Hal ini menjadikan perkembangan ekonomi ini ditujukan pada Jepang, dan Korea hanya menjadi buruh dan pemasok bahan mentah industri (Ayu 2011).

## **2. Dampak Perang Korea terhadap Pembangunan Korea Selatan**

Selain adanya faktor historis yang mempengaruhi dinamika perekonomian Korea Selatan, adanya konflik antara Korea Selatan dengan Korea Utara juga menjadi faktor adanya gejolak dalam perekonomian Korea Selatan. Perang saudara ini menimbulkan perpecahan, menjadikan adanya Korea Utara dan Korea Selatan. Perang saudara ini muncul juga karena akibat dari adanya Perang Dingin atau *Cold War* yang terjadi pasca perang dunia ke-2. Perbedaan ideologi yang mendasari munculnya perang saudara ini juga sedikit banyak mempengaruhi perekonomian kedua negara. Korea Utara menganut paham sosialis-komunis dan Korea Selatan menganut paham liberal-kapitalis (Wahyuningtyas 2013).

Garis demarkasi antara Korea Selatan dengan Korea Utara pun ditentukan oleh pihak Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara super power pada saat itu. Pada awalnya, garis demarkasi ini ditentukan untuk menerima tawanan-tawanan perang Jepang pasca Perang Pasifik. Walau pada akhirnya, garis tersebut

berubah fungsi menjadi garis demarkasi antara pertahanan Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Dan dengan adanya garis tersebut, menjadi pemicu terpecahnya Korea menjadi dua negara berbeda walaupun memiliki satu nenek moyang yang sama. Garis batas 38 derajat Lintang Utara (LU), menjadi batas demarkasi antara Korea Utara dan Korea Selatan (Wahyuningtyas 2013).

Terpecahnya Korea menjadi dua bagian negara juga menimbulkan kecurigaan dan sifat antipati diantara kedua negara. Perseteruan dua saudara bangsa ini juga menimbulkan konflik yang berkelanjutan dan susah menemui titik temu secara damai (Wahyuningtyas 2013). Sehingga pada Desember 1945 diadakanlah konferensi para menteri luar negeri di Moskow. Konferensi ini menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris menyatakan akan membentuk pemerintahan Korea yang demokratis. Pemerintahan ini merupakan pemerintahaan sementara yang akan berlangsung dalam kurun waktu lima tahun. Dalam pemerintahan yang terbentuk ini, terdapat perwakilan pasukan-pasukan Amerika Serikat dan Uni Soviet yang juga ikut serta di dalam nya (*joint commision*).

Akan tetapi, realisasi hal ini tidak memenuhi ekspektasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mengenai ideologi yang cocok diterapkan di Korea. Karena tidak ditemukan titik tengah, maka hal ini dilimpahkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (Wahyuningtyas 2013). Beberapa negara di belahan dunia pun terbagi ke dalam beberapa pihak atau sekutu. Korea Selatan memiliki sekutu yaitu Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya. Walaupun banyak negara lain juga yang

memberikan bantuan berupa bantuan tentara dan lainnya di bawah bendera PBB. Dan sekutu Korea Utara sendiri adalah Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok (Prasetyo Wahyu A.P 2015).

Pada 14 November 1947 dalam sidang umum PBB diputuskanlah pembentukan komisi yang disebut “*United Nations Temporary Commission on Korea*” atau Komisi Sementara PBB untuk Korea (Wahyuningtyas 2013). Tugas Komisi Sementara PBB antara lain ialah:

1. Mengambil alih Komisi Sementara PBB di Korea.
2. Mencoba mengadakan penyatuan Korea.
3. Mengadakan penyelidikan penarikan pasukan kependudukan di Korea. (Agung 2012)

Upaya-upaya untuk mengalihkan komisi sementara PBB di Korea ialah seperti mengadakan pengawasan keberlangsungan Pemilihan Umum yang telah disarankan untuk diadakan selambat-lambatnya pada 13 Maret 1948 dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat Korea. Selain itu Komisi Sementara PBB bertugas mengadakan pembicaraan dengan para wakil rakyat tentang hasil Pemilihan Umum untuk merundingkan kemerdekaan Korea. Dan jika pemerintahan ini sudah terbentuk maka dengan sendirinya tentara pendudukan akan ditarik mundur, lalu Korea Selatan dan Amerika Serikat dengan mudah menjalankan hal tersebut.

Karena sejak awal, PBB telah didominasi oleh kekuasaan Amerika Serikat dan di lain pihak, Uni Soviet menolak usulan tersebut dan menghendaki adanya penarikan tentara pendudukan terlebih dahulu sebelum didirikannya pemerintahan

Korea yang merdeka. Menjadi ajang permainan politik perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat, Korea akhirnya terpecah menjadi dua negara bagian yang berbeda dengan ideologi mereka sendiri-sendiri (Wahyuningtyas 2013). Terutama dengan adanya keputusan *Comission on Korea* tersebut, membuat Korea Utara makin membenci Korea Selatan dan Amerika Serikat. Korea Utara merasa haknya tidak diakui oleh PBB. Dengan demikian, Uni Soviet terus mendukung Korea Utara untuk mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan wilayah Korea seluruhnya dengan jalan kekerasan atau pun peperangan (Agung 2012).

Syngman Rhee yang menjadi presiden pertama Korea Selatan pada saat itu sempat memimpin kelompok sayap-kanan *Representative Democratic Council* untuk menentang perwalian Uni Soviet – Amerika Serikat di Korea. Syngman Rhee berpendapat bahwa setelah tiga puluh lima tahun masa penjajahan oleh Jepang, rakyat Korea menolak dipimpin oleh pemerintahan asing lainnya, termasuk Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lalu tentara Amerika Serikat pun mundur pada tahun 1949 dan meninggalkan Korea Selatan dengan jumlah persenjataan yang sedikit. Berbeda dengan Uni Soviet yang memberikan bantuan persenjataan dalam jumlah banyak ke tentara Korea Utara dan mendukung rencana invasi Kim Il Sung.

Perginya Uni Soviet dan Amerika Serikat tidak menyusutkan hasrat berperang antara Korea Utara dan Korea Selatan. Pertikaian masih terus berlangsung setelah kepergian dua negara adidaya tersebut. Bahkan pada tahun 1950, PBB menerima banyak pesan yang memberitahu bahwa Korea Utara akan

melakukan invasi, dan PBB menolak hal tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak menghintikan pertikaian kedua negara. Pada hari Minggu, 25 Juni 1950, pukul 04:00 waktu setempat pasukan Korea Utara mengadakan serangan ke Korea Selatan (Agung 2012). Dengan dasar alasan membalas provokasi Korea Selatan, tentara Korea Utara menyebrangi paralel ke-38 atau perbatasan. Dipimpin oleh salah seorang pengkhianat Syngman Rhee, mereka berencana untuk menangkap dan mengeksekusi Syngman Rhee. Pada saat itupun, Korea Selatan masih memiliki tingkat kesiapan tempur yang rendah. Pada 25 Juni 1950, Korea Selatan bahkan hanya memiliki 98.000 tentara (65.000 tentara tempur, dan 33.000 tentara penyokong), 22 pesawat (12 pesawat tipe penghubung dan 10 pesawat latihan AT6), serta tidak memiliki tank sama sekali. Meskipun terdapat pangkalan Jepang dan Amerika Serikat di Korea Selatan, akan tetapi mereka tidak memiliki pasukan asing yang berpangkalan di Korea Selatan pada saat itu.

Dalam serangan tersebut, Korea Utara dapat menduduki beberapa wilayah di Korea Selatan seperti Chucon, Ongjin, dan bahkan Kaesong sebagai kota penting Korea Selatan. Sebenarnya, sasaran utama Korea Utara pada saat itu ialah Seoul, Ibu kota Korea Selatan. Akan tetapi dengan masalah cuaca, penyerangan tidak berhasil dilaksanakan. Namun 3 hari setelah penyerangan, Korea Utara berhasil menduduki Soul. Hal ini menyebabkan Presiden Syngman Rhee beserta staf pada saat itu harus meninggalkan Seoul dan dipindahkan ke Taejon. Seoul sempat diduduki oleh Korea Utara untuk kurun waktu 4 bulan, hingga pada 26 September 1950, Seoul berhasil direbut kembali oleh Korea Selatan (Agung 2012).

Bahkan setelah penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan tersebut, Amerika Serikat berhasil membujuk PBB untuk mengadakan sidang dan menghasilkan resolusi yang antara lain sebagai berikut:

1. Mendesak Korea Utara agar segera menghentikan perang dan menarik mundur pasukan-pasukannya sampai garis 38 derajat Lintang Utara.
2. Memberikan sanksi kepada Korea Utara apabila pihak Korea Utara tidak memperdulikan desakan tersebut, maka PBB dengan para anggota akan membantu Korea Selatan.

Pada 27 Juni 1950 Presiden Truman pun memerintahkan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk memberi perlindungan kepada pasukan Korea Selatan (Agung 2012). Akan tetapi, setelah penyerangan tersebut justru menyebabkan semakin banyak tentara Korea Selatan yang kurang loyal terhadap rezim Syngman Rhee dan lari ke selatan atau bahkan berkhianat dan bergabung dengan tentara Korea Utara (Prasetyo Wahyu A.P 2015).

Perundingan damai telah dilakukan beberapa kali akan tetapi selalu berakhir gagal dan tidak menghasilkan hasil yang signifikan. Hal tersebut sedikit banyak adalah dikarenakan Korea Utara yang masih mengembangkan kapasitas nuklirnya. Senjata nuklir ini kerap kali digunakan sebagai *bargaining instrument* Korea Utara dalam upayanya mendapatkan bantuan luar negeri. Pertikaian antara kedua negara ini pun masih sering terjadi hingga dewasa ini. Bahkan pada bulan Oktober 2006 dan Mei 2009 pihak Korea Utara masih ditemukan melakukan percobaan

peluncuran senjata nuklir (Prasetyo Wahyu A.P 2015). Hal tersebut tentu saja menimbulkan keresahan bagi rakyat Korea Selatan dan juga dunia internasional.

Bagi Korea Selatan, konflik ini juga telah menggoyahkan perekonomian negara dikarenakan kurangnya infrastruktur di bidang industri. Karena hampir semua industri berat dan sumber daya alam berada di wilayah Korea Utara. Selain itu, walaupun perang ini hanya berlangsung selama 3 tahun yaitu dimulai pada tahun 1950–1953, perang saudara ini menimbulkan banyak kerugian bagi Korea Selatan itu sendiri. Pada tahun 1950, Korea Selatan bahkan masuk ke dalam salah satu negara termiskin di dunia. Posisi Korea Selatan ini sejajar dengan negara-negara miskin di Afrika dan Asia (Ayu, 2011). Pendapatan per kapita Korea Selatan turun menjadi USD 67 yang lebih rendah dari sebelum perang berlangsung. Selain itu, 40% infrastruktur hancur dan turunnya produksi pertanian 27%. Hal tersebut lah yang menjadikan kondisi Korea Selatan pada saat itu tidak berbeda jauh dengan negara-negara miskin di Afrika (Makdori, 2015). Disamping perekonomian negara yang menjadi krisis, banyaknya rakyat Korea yang meninggal saat terjadinya perang saudara tersebut, serta sejumlah besar rumah, pabrik dan harta benda pun lenyap. Perang saudara ini juga menimbulkan efek ketidakpercayaan antar sesama masyarakat Korea, sehingga sampai saat ini pun ketegangan masih dirasakan antar kedua negara ini (Wahyuningtyas 2013).

Perang pun dinyatakan resmi berakhir pada 27 Juli 1953. Amerika Serikat, Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara menandatangani persetujuan gencatan senjata. Presiden Korea Selatan, Syngman Rhee, menolak menandatangani namun berjanji akan menghormati kesepakatan gencatan

senjata tersebut. Namun kerugian lainnya yang dihasilkan dari perang ini adalah Amerika Serikat kehilangan 36.914 tentaranya. Sementara Korea Selatan kehilangan 415.005 tentaranya. Korea Utara menurut Departemen Pertahanan Amerika Serikat kehilangan 2 juta serdadunya. Jumlah yang sangat besar pada perang yang berlangsung selama tiga tahun (Agung 2012).

### **3. Pembangunan Ekonomi Korea Selatan Era Syngman Rhee**

Atas dasar persamaan ideologi, Amerika Serikat pun membantu dalam pembentukan Republik Korea (Korea Selatan) pada 15 Agustus 1948 dan beribu kota di Seoul, dengan presiden pertamanya Syngman Rhee. Pemilihan umum Korea Selatan ini dibentuk oleh Dewan Nasional Korea Selatan dibentuk tentara Amerika Serikat yang diadakan pada 10 Mei 1948. Di lain tempat, Korea Utara juga mengadakan pemilihan umum pada 25 Agustus 1948 dan terbentuklah Republik Demokrasi Rakyat Korea (Korea Utara) dan beribu kotakan di Pyongyang. Kim Il Sung menjabat sebagai perdana menteri Korea Utara pada saat itu. Kedua pemerintahan inipun saling mengklaim bahwa pemerintahan mereka merupakan satu-satunya pemerintahan yang sah di semenanjung Korea (Wahyuningtyas 2013).

Korea Utara dikuasi oleh pemerintah yang menganut sistem komunis. Sedangkan Korea Selatan menganut sistem kapitalis (A. Budiman 1991). Amerika Serikat pun memiliki strategi tersendiri untuk Korea Selatan dikarenakan adanya ancaman dari Korea Utara. Strategi tersebut yaitu, Amerika Serikat berusaha

untuk membuat Korea Selatan menjadi negara yang demokratis, dan negara yang bebas. Hal tersebut di paparkan untuk mengkontraskan dengan Korea Utara yang otoriter. Strategi yang kedua yaitu, Korea Selatan harus berhasil dalam membangun ekonominya (A. Budiman 1991).

Salah satu usaha Korea Selatan untuk memperbaiki perekonomian negaranya adalah dengan memanfaatkan warisan yang Jepang tinggalkan untuk Korea. Korea Selatan telah berusaha untuk memaksimalkan warisan Jepang akan tetapi hal tersebut terhalang oleh buruknya perekonomian negara dan langkanya modal untuk membeli bahan baku dan alat-alat pabrik. Hal tersebut membuat kondisi Korea semakin parah. Korea Selatan pada saat itu masih bergantung pada Korea Utara untuk pemasokan tenaga listrik. Hingga tahun 1945, Korea Selatan masih bergantung 95% pasokan tenaga listrik pada Korea Utara. Akan tetapi, kondisi perekonomian Korea Utara pun sedang buruk, sehingga menyebabkan putusnya persediaan listrik dari Korea Utara ke Korea Selatan pada tahun 1948. Hal ini semakin memperburuk kondisi Korea Selatan pada saat itu (Wahyuningtyas 2013).

Syngman Rhee berhasil menjadi presiden pertama Republik Korea Selatan atas dukungan Amerika Serikat dan juga Partai Demokrasi Korea yang dikuasai oleh para tuan tanah. Sehingga parlemen Korea Selatan dikuasai oleh para tuan tanah. Parlemen tersebut menolak UU *Land Reform* pada tahun 1948 (A. Budiman 1991). *Land Reform* ini sendiri dapat disebut dengan Reforma Agraria. Reforma Agraria disini bermaksud sebagai usaha sistematis untuk memperbaiki hubungan antara manusia dengan tanah yang dirasa belum harmonis dan belum

mencerminkan keadilan sosial. Usaha perbaikan yang dilakukan antara lain adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menjadi tatanan keagrarian baru yang dapat menjamin keadilan, harmoni sosial, produktivitas dan keberlanjutan, berdasarkan prinsip bahwa “tanah pertanian harus dikerjakan dan diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri”.

*Land reform* ini sendiri dapat menciptakan pemerataan sosial-ekonomi di berbagai lapisan masyarakat di pedesaan (Mungkasa 2014). Walaupun parlemen menolak untuk pelaksanaan *Land reform*, pemerintah Amerika Serikat justru menganggap *Land Reform* perlu untuk dilaksanakan. Terlebih lagi karena di utara dan Jepang melaksanakan *Land Reform* secara besar-besaran. Oleh sebab itu, tanah yang dirampas oleh Jepang di Korea, dibagikan kembali. Syngman Rhee berusaha untuk menentang UU ini, tapi berujung gagal. Pada tahun 1949, UU *Land Reform* diloloskan oleh parlemen, melalui tekanan juga dari Amerika Serikat (A. Budiman 1991).

#### **4. Dukungan Amerika Serikat terhadap Pembangunan Korea Selatan**

Walaupun dinilai sebagai negara yang provokatif saat perang Korea, dukungan Amerika Serikat dengan berada di pihak Korea Selatan pada saat perang Korea pun menimbulkan efek pada hubungan Korea Selatan dan Amerika Serikat di waktu-waktu setelahnya. Bahkan pada saat keberlangsungan perang Korea, masa-masa penyerangan Korea Utara terhadap Korea Selatan dan masa

awal kemerdekaan Korea Selatan, Amerika Serikat telah memberikan banyak dukungan kepada Korea Selatan.

Pada tahun 1957 hingga 1962, Amerika Serikat memberikan bantuan yang cukup besar kepada Korea Selatan. Bantuan tersebut menyumbangkan sekitar 70% impor yang dilakukan oleh Korea Selatan. Pada hal ini di antara tahun 1946-1976 bantuan tersebut berjumlah US\$ 5,74 milyar, dimana 45% nya diberikan pada periode antara 1953-1961 yaitu masa Korea Selatan sedang sibuk memperkuat sektor industrisubstitusi impor. Hal ini pun dinilai sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Korea Selatan, terutama di bidang indsutri. Selain itu dengan adanya bantuan tersebut, kegiatan impor di Korea Selatan pun menjadi semakin baik(Wahyuningtyas 2013). Akan tetapi pada tahun 1959, pemerintah Amerika Serikat mengurangi bantuan ekonominya terhadap Korea Selatan. Bagi negara-negara yang tergantung pada Amerika Serikat, akibatnya dapat berujung fatal (A. Budiman 1991). Pada tahun 1960, dari sumbangan ekspor Korea Selatan sendiri terhadap impor hanya berjumlah 11% untuk tahun 1955, dan 22 % untuk 1960 (Wahyuningtyas 2013).

Korea Selatan mendapat beberapa keuntungan dari negara penjajahnya yaitu Jepang dengan pengenalan sektor industri dan juga peninggalan beberapa fasilitas. Selain itu adanya dukungan dan kerjasama yang terjalin dengan Amerika Serikat yang cukup membantu perekonomian negara terutama dalam sektor industri. Akan tetapi, seluruh pembangunan Korea Selatan pada saat itu harus pupus. Presiden Korea Selatan yaitu Syngman Rhee ditemukan melakukan tindakan korupsi, sehingga memporakporandakan perekonomian serta

perkembangan negara. Selain tindakan korupsi, terjadi banyak penyimpangan di Korea Selatan. Hal ini dikarenakan pada masa Syngman Rhee banyak ditanamkan cara-cara otoriter dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa. Sikapnya yang otoriter inilah yang membuat rakyat Korea Selatan menjadi semakin menderita. Terlebih lagi hal tersebut di perparah dengan penyimpangan bantuan Amerika Serikat yang diberikan kepada Korea Selatan. Memperkuat legitimasi pemerintahnya adalah alasan mengapa Syngman Rhee menggunakan bantuan tersebut (Wahyuningtyas 2013).

#### **5. Awal Mula Berkuasanya Park Chung Hee**

Keadaan ekonomi Korea Selatan terus memburuk dikarenakan adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta melemahnya sektor industri dalam negeri terhadap kegiatan impor yang begitu deras. Hal tersebut membawa dampak yaitu meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan di Korea Selatan. Hal ini mendorong para mahasiswa Korea Selatan untuk mengadakan demonstrasi. Demonstrasi ini diadakan pada tanggal 19 April 1960. Demonstrasi ini pun berhasil menjatuhkan Syngman Rhee dari kursi presiden (Wahyuningtyas 2013).

Setelah turunnya Syngman Rhee sebagai presiden, pemerintahan yang demokratis sempat ditegakkan. Akan tetapi umurnya tidak sampai satu tahun (A. Budiman 1991). Sebuah kudeta pun dilancarkan dibawah pimpinan Jendral Park Chung Hee dan rekannya Kolonel Kim Jong Pil pada tanggal 16 Mei 1961 (Darini 2009). Park Chung Hee pun dapat menduduki kursi presiden Korea Selatan

setelah kudeta tersebut berlangsung. Menarik untuk diketahui bahwa pada awalnya, Amerika Serikat tidak begitu menyukai Park Chung Hee untuk menjadi presiden Korea Selatan dikarenakan cara kudeta nya yang menyebabkan ia menjadi presiden. Terlebih lagi, di waktu lampau Park merupakan seorang kader komunis. Amerika Serikat yang dipimpin oleh presiden John Kennedy pada saat itu tidak menyukainya, karena notabennya Kennedy merupakan presiden yang liberal. Namun pemerintah Amerika Serikat pada akhirnya dapat menerimanya.

Akan tetapi Park pun harus menyetujui beberapa persyaratan dari Amerika Serikat seperti, junta militer yang berkuasa akan mengembalikan pemerintahan sipil yang didasarkan pada perwakilan rakyat, mengakui kekuasaan pasukan PBB untuk mengontrol angkatan bersenjata Korea, melaksanakan pembaruan-pembaruan di bidang keuangan dan ekonomi. Park pun menerima persyaratan-persyaratan tersebut, walaupun ia mungkin tidak berhasil memberikan sistem politik yang demokratis seperti yang Amerika Serikat inginkan. Akan tetapi, Park bertekad untuk membangun perekonomian Korea Selatan. Maka sebuah negara orde baru pun lahir (A. Budiman 1991).

Menjelang lahirnya pemerintahan di bawah pimpinan Park Chung Hee, kondisi Korea Selatan masih sangat banyak yang harus dibenahi. Mengingat banyak hal yang sudah Korea Selatan lalui hingga sampai di pemerintahan Park Chung Hee. Kondisi Korea Selatan menjelang pemerintahan Park Chung Hee antara lain sebagai berikut:

1. Ketika baru merdeka, Korea masih merupakan negara agraris. Tanah dikuasai oleh para tuan tanah. Yang dikuasai oleh orang-orang Jepang, dirampas dan dibagikan kepada para petani pada tahun 1948. Pada tahun 1949, UU *Land Reform* diloloskan. Maka, sejak tahun 1950 sampai berakhirnya Perang Korea pada tahun 1953, para tuan tanah praktis sudah berhasil diberantas.
2. Pada waktu Syngman Rhee, para birokrat negara bersama kelompok tuan tanah menguasai kehidupan ekonomi dan politik. Pemerintah Amerika Serikat pada dasarnya tidak terlalu mendukung pemerintah ini, karena pemerintah Rhee gagal membentuk sebuah pemerintahan yang bersih dan demokratis, yang bisa melaksanakan pembangunan ekonomi. Tapi, karena adanya Perang Korea, Amerika Serikat terpaksa berpihak kepada Rhee.
3. Dengan berhasilnya dilaksanakan *Land Reform*, tingkat kehidupan di pedesaan meningkat. Ini meningkatkan daya beli petani, yang nantinya akan berguna sebagai pendukung dari proses industrialisasi.

Pada mulanya, pemerintahan baru dibawah pimpinan presiden Park mengalami kesulitan. Hal itu dikarenakan Amerika Serikat masih mencurigai latar belakang Park Chung Hee. Akan tetapi, demi mendapatkan kepercayaan rakyatnya, dan kepercayaan Amerika Serikat, Park fokus untuk meneruskan misinya. Terutama dalam hal perbaikan perekonomian negara (A. Budiman 1991). Maka lahirlah sebuah orde baru di Korea Selatan. Park Chung Hee memiliki beberapa program kerja yang ia fokuskan pada negaranya.

Dengan berfokus pada perbaikan perekonomian negara, Park mencanangkan beberapa program kerja yang sesuai untuk perkembangan Korea Selatan pada saat itu. Park juga menaruh fokus pada perkembangan sektor industri untuk memajukan perekonomian negara. Tidak hanya untuk perkembangan perekonomian pada saat itu saja akan tetapi untuk masa panjang.

Rencana pembangunan lima tahun (1967-1971) menjadi salah satu program yang digerakkan oleh Park Chung Hee. Program ini dilaksanakan bertahap dengan durasi waktu lima tahun setiap programnya. Yang pertama dilaksanakan pada 1962-1966, yang kedua pada 1967-1971 bertujuan untuk membangun industri Korea Selatan, dan yang ketiga pada 1972-1976 untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan industri dan pertanian, yang keempat pada 1977-1981 untuk pembangunan ekonomi yang mandiri dan pemerataan hasil-hasil pembangunan (A. Budiman 1991).

Serta masih ada program lainnya yang telah Park Chung Hee realisasikan dan terbukti membawa efek baik bagi perkembangan negaranya. Program-program tersebut yakni *Economic Planning Board* (EPB), Kebijakan *Export-Oriented Industrialization* (EOI), Kebijakan *Heavy Chemical Industry* (HCI), dan yang terakhir adalah Gerakan *Saemaul Undong* (Darini 2009).